

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Indonesia menjadi negara dengan peringkat keempat di dunia dalam hal jumlah penduduk. Tercatat, di wilayah Asia Tenggara sebanyak 40,9% penduduknya berasal dari Indonesia. Menurut data yang dikeluarkan Badan Pusat Statistik (BPS), pertiap tahunnya Indonesia mengalami peningkatan pada jumlah penduduk. Pada tahun 2021 jumlah penduduk Indonesia sebanyak 272.682,5 juta jiwa dan pada tahun 2023 jumlah penduduk mengalami peningkatan menjadi sebanyak 278.696,2 juta jiwa, sehingga Indonesia dapat dikategorikan negara padat penduduk (BPS, 2023). Hal ini dapat menjadi sebuah masalah kependudukan bagi Indonesia yang akan menimbulkan masalah-masalah baru seperti kualitas penduduk, persebaran penduduk, kecukupan konsumsi, dan lain sebagainya.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 52 Tahun 2009 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga sebagai dasar pelaksanaan Program Kependudukan dan Keluarga Berencana menekankan kewenangan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) mengenai masalah pengendalian penduduk (Ramadhani, 2020). Hal ini menuntut pemerintah Indonesia bersama BKKBN harus meningkatkan program KKBPK (Kependudukan, Keluarga Berencana, dan Pembangunan Keluarga). melalui proses pembentukan Kampung Keluarga Berencana.

Program Kampung Keluarga Berencana mulai dicanangkan tahun 2016 dengan program ini dianggap dapat membangun masyarakat (Timisela et al., 2023).

Fokus utamanya adalah pengendalian pertumbuhan penduduk dengan cara meningkatkan partisipasi dan kesadaran masyarakat akan keluarga berencana terkhusus berkaitan dengan pelayanan kesehatan reproduksi, penggunaan kontrasepsi, serta penurunan angka kelahiran. Namun beberapa tahun terakhir tujuan dari Kampung Keluarga Berencana itu tidak berjalan sesuai tujuan awalnya (Maleke et al., 2022). Program tersebut belum berjalan optimal, mulai dari penurunan capaian peserta KB dan kurangnya kesadaran masyarakat tentang pentingnya kebutuhan masa depan kesehatan dan kesejahteraan.

Tabel 1. 1
Persentase Wanita Umur 14-49 Tahun Berstatus Kawin Menggunakan Alat KB (2016-2019)

Tahun	Persentase
2016	59,39%
2017	58,70%
2018	58,73%
2019	55,96%

Sumber: Badan Pusat Statistik

Penurunan peserta KB ini dapat diartikan penyelenggaraan program Kampung Keluarga Berencana belum optimal dalam pengendalian penduduk ditambah dengan adanya asumsi masyarakat mengenai kampung Keluarga Berencana hanya milik BKKBN dan hanya terfokus pada alat kontrasepsi, sehingga lintas sektor tidak merasa memiliki tanggung jawab dalam pelaksanaannya. Hasil evaluasi yang dilakukan oleh BPKP pada tahun 2018 juga menunjukkan bahwa beberapa fungsi keluarga belum berjalan secara optimal. Hal ini menunjukkan bahwa kurangnya komitmen dan integrasi serta kegiatan lintas sektor akibat kebijakan dan prosedur tertulis yang mengatur keterlibatan lintas sektor masih

belum jelas. Oleh karena itu, Kampung Keluarga Berencana diubah menjadi Kampung Keluarga Berkualitas untuk menunjukkan peran pemerintah, swasta, dan semua bagian masyarakat untuk meningkatkan kualitas dalam meningkatkan kualitas manusia dan keluarga mulai dari tingkat pemerintahan terendah yaitu desa/kelurahan. Hal ini sebagai wujud aktivitas lanjutan dari kebijakan yang ditetapkan. Dalam hal ini diperkuat dengan surat edaran Kemendagri Nomor 843.4/2879/SJ mengenai intensifikasi Kampung KB tanggal 15 April 2020 Kampung Keluarga Berencana mulai melakukan *rebranding* menjadi Kampung Keluarga Berkualitas.

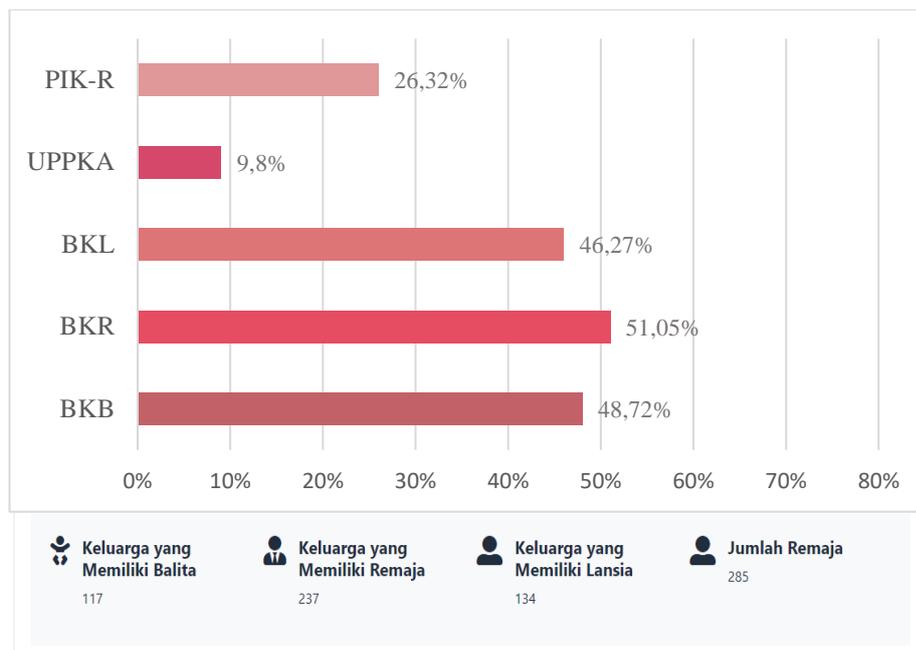
Selanjutnya didukung dengan dikeluarkan Inpres No. 3 Tahun 2022 tentang Optimalisasi Penyelenggaraan Kampung KB. Diharapkan dengan Inpres ini, pelaksanaan kegiatan Kampung KB dapat dioptimalkan dan semua pihak yang memiliki kepentingan dapat bahu membahu dan menjadi gerakan bersama di tingkat desa dan kelurahan yang terintegrasi dan konvergensi (BKKBN, 2023). Pada program ini lebih menekankan pada peningkatan kualitas dan produktivitas tugas dan fungsi pemangku kepentingan terkait, mengenai peningkatan kualitas sumber daya manusia seiring dengan peningkatan kualitas keluarga, dengan memperhatikan 8 fungsi keluarga yang didukung dengan adanya ketersediaan sarana dan prasarana, dukungan dan komitmen pemerintah desa/kelurahan dan pemerintah daerah, partisipasi aktif masyarakat, tokoh masyarakat serta para kader yang mengelola kegiatan di Kampung KB atau disebut dengan pemangku kepentingan. Dalam hal ini, penting bagi pemangku kepentingan baik dari unsur pemerintah atau unsur masyarakat untuk ikut serta dalam proses perkembangan

program yang dijalankan karena berdasarkan buku Pedoman Pengelolaan Kampung KB, pemangku kepentingan dapat memegang peranan penting dalam mengelola dan meminimalisir masalah kependudukan.

Pelaksanaan program kebijakan dapat dikatakan berhasil jika pada prosesnya terdapat dukungan yang kuat dan mencerminkan kepentingan. Suatu kebijakan juga dikatakan berhasil jika kebijakan yang dibuat telah mampu dilaksanakan berdasarkan tujuan yang telah ditetapkan. Keberhasilan suatu program sangat berkaitan erat dengan keefektifan pelaksanaan program tersebut (Ravyansah et al., 2022, p. 141). Hingga saat ini jumlah Kampung KB menurut data dari BKKBN sebanyak 38.157 kampung yang tersebar di seluruh kota/kabupaten yang ada di Indonesia. Dari 19 kota yang ada di Provinsi Sumatera Barat terdapat tiga kota yang telah menjadikan seluruh kelurahan yang ada menjadi Kampung KB, yaitu Kabupaten Pasaman, Kota Solok, dan Kota Padang Panjang. Kota Padang Panjang yang pertama menuntaskan program Kampung KB pada tahun 2022 (BKKBN, 2024).

Setelah program Kampung KB dituntaskan, ternyata masih memunculkan masalah. Pada fakta yang didapatkan dari observasi awal yang peneliti lakukan, dari 16 kelurahan yang ada di Kota Padang Panjang Kelurahan Ekor Lubuk, Koto Katik, dan Tanah Hitam menjadi tiga kelurahan yang dapat dikatakan maksimal karena telah menjadi kampung KB percontohan di tingkat nasional. Masih ada 13 Kampung KB yang capaian kegiatannya belum maksimal, salah satunya Kampung KB Kelurahan Tanah Pak Lambik. Kelurahan yang berdasarkan modul Kampung KB menjadi kriteria wilayah prioritas karena berada sepanjang bantaran kereta api.

Hal ini ditambah dengan program Kampung KB di Kelurahan Tanah Pak Lambik sempat terhenti serta diperkuat dengan pernyataan kepala bidang Dinas sosial P2KBP3A yang menyatakan bahwa Kampung KB Kelurahan Tanah Pak Lambik termasuk kampung KB yang capaian kegiatannya belum maksimal.



Gambar 1. 1
Persentase Capaian Kegiatan

Sumber: Rumah Dataku Kelurahan Tanah Pak Lambik Tahun 2023

Dilihat dari data yang dilaporkan dan ditampilkan pada situs BKKBN indikator-indikator yang mempengaruhi, seperti pengurus POKJA Kampung KB, sarana dan prasarana, dukungan terhadap Kampung KB, dan mekanisme operasional Kampung KB Kelurahan Tanah Pak Lambik dapat tergolong lengkap dan cukup baik. Berikut data mengenai kelengkapan indikator Kampung KB Kelurahan Tanah Pak Lambik.

Tabel 1. 2
Data Kelengkapan Indikator Kampung KB Bajamba Kelurahan Tanah Pak
Lambik Tahun 2023

NO	INDIKATOR	KELENGKAPAN	
		ADA	TIDAK
1.	Pengurus Pokja	V	
2.	Sarana dan Prasarana		
	a) BKB (Bina Keluarga Balita)	V	
	b) BKR (Bina Keluarga Remaja)	V	
	c) BKL (Bina Keluarga Lansia)	V	
	d) UPPKA (Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor)	V	
	e) PIK-R (Pusat Informasi dan Konseling Remaja)	V	
	f) Sekretariat Kampung KB (KKB)	V	
	g) Rumah Dataku	V	
3.	Dukungan Terhadap KKB		
	a) Sumber Dana	V	
	b) Kepengurusan/pokja KKB	V	
	c) SK pokja KKB	V	
	d) PLKB/PKB sebagai pendamping dan pengarah kegiatan	V	
	e) Regulasi dari pemerintah daerah	V	
	f) Pelatihan sosialisasi bagi Pokja KKB	V	
	g) Jumlah anggota pokja yang sudah terlatih/tersosialisasi pengelolaan KKB	V	
	h) Rencana Kegiatan Masyarakat	V	
	i) Penggunaan data dalam perencanaan dan evaluasi kegiatan	V	
4.	Mekanisme Operasional		
	a) Rapat perencanaan kegiatan	V	
	b) Rapat koordinasi dengan dinas/instansi terkait pendukung kegiatan	V	
	c) Sosialisasi Kegiatan	V	
	d) Monitoring dan Evaluasi Kegiatan	V	
	e) Penyusunan Laporan	V	

Sumber: Kantor Lurah Tanah Pak Lambik Tahun 2023

Dari tabel tersebut menunjukkan bahwa Kampung KB Kelurahan Tanah Pak Lambik memiliki kelengkapan indikator yang baik untuk memenuhi standar untuk programnya dikatakan berhasil. Namun di lain sisi dari data berjalan yang ditemukan mengenai capaian kegiatan yang dilakukan di Kampung KB Kelurahan Tanah Pak Lambik, didapati belum mencapai hasil yang maksimal. Belum maksimalnya hasil yang dicapai dapat dilihat pada kriteria penilaian yaitu; (1) seleksi berbasis website; (2) wawancara; dan (3) verifikasi lapangan (lihat lampiran 5). Hal tersebut menunjukkan bahwa adanya ketidakselarasan antara kelengkapan indikator-indikator yang dimiliki dengan hasil yang dicapai. Hal ini juga ditambah dengan kegiatan di Kampung KB Kelurahan Tanah Pak Lambik yang didominasi oleh kegiatan posyandu balita dan lansia, yang menandakan bahwa kegiatan di kampung KB belum terintegrasi dan terkonvergensi serta membutuhkan pengelolaan kampung KB yang lebih optimal oleh pemangku kepentingan.

Melihat permasalahan tersebut menjadi hal yang menarik untuk mengidentifikasi pengelolaan program Kampung KB oleh pemangku kepentingan di Kelurahan Tanah Pak Lambik. Pada dasarnya kerja sama antar pemangku kepentingan unsur pemerintah dan unsur masyarakat akan dapat meningkatkan keberhasilan dan keberlanjutan program Kampung KB yang pada akhirnya akan berkontribusi pada peningkatan kualitas hidup masyarakat.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah penelitian yang telah dijabarkan di atas dapat dilihat bahwa Kelurahan Tanah Pak Lambik merupakan salah satu kelurahan di Kota Padang Panjang yang sudah menjadi bagian dari program Kampung KB

yang tujuan utamanya untuk mewujudkan keluarga yang berkualitas. Dalam mewujudkan tujuan yang hendak dicapai, pelaksanaan program tersebut didasarkan pada indikator-indikator yang telah ditetapkan yang harus menjadi perhatian semua pihak yang terkait.

Namun capaian kegiatan dari program Kampung KB Kelurahan Tanah Pak Lambik belum terlaksana secara maksimal, sehingga tujuan dari program tersebut tidak menyentuh seluruh keluarga yang menjadi sasaran dari kegiatan tersebut. Hal ini tentu saja menjadi sebuah pertanyaan sehingga diperlukan kajian yang lebih dalam agar dapat mendeskripsikan pengelolaan program Kampung KB untuk terwujudnya keluarga yang berkualitas. Berdasarkan hal tersebut, maka rumusan masalah penelitian ini yaitu: **Bagaimana pengelolaan program Kampung KB oleh pemangku kepentingan di Kelurahan Tanah Pak Lambik, Kota Padang Panjang.**

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan paparan latar belakang dan rumusan masalah yang sudah dijelaskan peneliti di atas, maka terdapat dua tujuan yang ingin dicapai peneliti dalam melakukan penelitian ini sebagai berikut.

a. Tujuan Umum

Secara umum, penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan pengelolaan oleh pemangku kepentingan dalam implementasi program Kampung Keluarga Berkualitas dalam mewujudkan keluarga berkualitas

b. Tujuan Khusus

- 1) Mendeskripsikan pengelolaan oleh pemangku kepentingan formal dalam pelaksanaan program Kampung KB di Kelurahan Tanah Pak Lambik, Kota Padang Panjang
- 2) Menjelaskan pengelolaan oleh pemangku kepentingan informal dalam pelaksanaan program Kampung KB di Kelurahan Tanah Pak Lambik, Kota Padang Panjang.

1.4 Manfaat Penelitian

a. Manfaat Akademis

- 1) Penelitian yang dilakukan diharapkan dapat memberikan kontribusi terhadap pengembangan ilmu pengetahuan yang berkaitan dengan sosiologi kebijakan publik tentang pengelolaan program Kampung KB di Kelurahan Tanah Pak Lambik, Kota Padang Panjang
- 2) Membantu dalam memperluas literatur serta sebagai bahan perbandingan peneliti selanjutnya tentang program Kampung KB.

b. Manfaat Praktis

- 1) Hasil dari penelitian yang dilakukan dapat memberikan rekomendasi praktis serta pedoman dalam mengambil kebijakan bagi pemerintah pusat dan daerah dalam pengelolaan program Kampung KB, sehingga permasalahan yang ada dalam pengelolaan program dapat ditemukan solusi yang efektif
- 2) Menjadi bahan evaluasi bagi pemangku kepentingan formal dan informal terkait kerjasama dalam mengelola program Kampung KB

- 3) Dapat meningkatkan pengetahuan tentang pentingnya program Kampung KB untuk mewujudkan kualitas keluarga dari berbagai aspek

1.5 Tinjauan Pustaka

1.5.1 Konsep Pengelolaan

A. Pengertian Pengelolaan

Kata pengelolaan berasal dari kata kelola yang dalam KBBI diartikan sebagai proses, cara, perbuatan mengelola; proses melakukan kegiatan tertentu dengan menggerakkan tenaga orang lain; proses membantu merumuskan dan tujuan organisasi; proses memberikan pengawasan pada semua hal yang terlibat dalam pelaksanaan dan pencapaian tujuan (KBBI, 2023). Istilah lain dari konsep pengelolaan dapat disamakan dengan “*management*” dimana kata “*management*” itu sendiri telah masuk ke dalam bahasa Indonesia yang berarti sama dengan pengelolaan, yakni sebagai suatu proses mengkoordinasi dan mengintegrasikan kegiatan sehingga dapat terlaksana dengan efektif dan efisien (Mariyana et al., 2010, p. 16). Konsep pengelolaan juga dapat dipahami sebagai suatu proses yang di dalamnya terdapat perencanaan pengorganisasian, pengarahan, dan pengawasan dalam rangka mencapai tujuan yang diharapkan (Terry & Rue, 2019, p. 9). Pengelolaan adalah suatu tindakan atau upaya yang dilakukan oleh sekelompok orang untuk menyelesaikan serangkaian tugas untuk mencapai tujuan tertentu.

Pada pengertian lain menurut Horold Koontz dan Cyril O’Donnel dalam (Pananrangi, 2017, p. 2) mengartikan sebagai upaya untuk mencapai tujuan tertentu dengan kegiatan yang dilakukan orang lain. Dari pengertian di atas dapat disimpulkan bahwa pengelolaan adalah sebuah suatu proses mengkoordinasi dan

mengintegrasikan kegiatan yang di dalamnya terdapat perencanaan pengorganisasian, pengarahan, dan pengawasan dalam rangka mencapai tujuan yang diharapkan sehingga dapat terlaksana dengan efektif dan efisien.

B. Tujuan Pengelolaan

Pengelolaan bertujuan untuk mengorganisasi dan mengkoordinasi berbagai sumber daya baik manusia, finansial, maupun material untuk memastikan semua elemen bekerja secara baik menuju tujuan yang telah ditetapkan. Terdapat beberapa tujuan pengelolaan, yaitu (Husaini, 2014, p. 34):

1. Untuk mencapai tujuan organisasi, yang didasarkan pada visi dan misi organisasi
2. Untuk mempertahankan keseimbangan antara tujuan yang bertentangan, pengelolaan diperlukan guna menjaga harmoni antara berbagai tujuan, sasaran, dan aktivitas yang mungkin berkonflik di antara para pemangku kepentingan organisasi.
3. Untuk mencapai efisiensi dan efektivitas, kinerja organisasi atau lembaga.

C. Pengelolaan yang Baik

Pengelolaan yang baik mencakup pada berbagai praktik atau prinsip yang dirancang untuk memastikan bahwa program mencapai tujuan dengan cara yang efektif dan efisien. George R. Terry, menjelaskan tentang pengelolaan yang baik meliputi:

1. Perencanaan (*Planning*) adalah proses memilih fakta dan melakukan upaya untuk menghubungkan fakta satu sama lain, kemudian membuat

perkiraan dan peramalan tentang keadaan dan menetapkan tindakan yang diperlukan untuk mencapai hasil yang diinginkan.

2. Pengorganisasian (*Organizing*) adalah proses menggabungkan semua tugas yang harus dilakukan oleh kelompok kerja dan menetapkan wewenang dan tanggung jawab tertentu sehingga semua orang bekerja sama untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan.
3. Penggerakan (*Actuating*) menempatkan setiap anggota di dalam kelompok untuk bekerja sama secara sadar dalam rangka mencapai suatu tujuan sesuai dengan pola organisasi dan perencanaan.
4. Pengawasan (*Controlling*) adalah proses penentuan, pengukuran, dan koreksi dari pelaksanaan kegiatan yang dilakukan agar dapat berjalan sesuai rencana.

1.5.2 Program Kampung KB

Konsep “kampung” adalah istilah yang digunakan untuk menggambarkan unit administratif paling kecil yang meliputi wilayah tertentu. Sebuah gagasan mengatakan bahwa membangun sebuah masyarakat yang berdaya dapat dimulai dengan membangun karakter keluarga yang kuat. Banyak keluarga yang cerdas dan kuat akan membentuk kelompok masyarakat yang lebih kuat dan berkualitas. Keluarga berkualitas menurut UU Nomor 52 Tahun 2009 adalah keluarga yang dibentuk berdasarkan perkawinan yang sah dan bercirikan sejahtera, sehat, maju, mandiri, memiliki jumlah anak yang ideal, berwawasan ke depan, bertanggung jawab, harmonis dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa (BPK, 2009, p. 5). Dalam hal ini konsep keluarga berkualitas dikemas dalam bentuk sebuah program

sehingga pelaksanaannya dapat berjalan sistematis dan efisien. Menurut Arikunto dan Jabar dalam (Chandra, 2022, p. 3), program merupakan rancangan yang akan dilaksanakan, meliputi perwujudan dan implementasi kebijakan, kegiatan yang sering dilakukan dan berkesinambungan dengan rentang waktu yang lama serta melibatkan sekelompok orang dalam suatu organisasi.

Kampung KB didefinisikan sebagai satuan wilayah setingkat desa dimana terdapat integrasi dan konvergensi penyelenggaraan pemberdayaan dan penguatan institusi keluarga dalam seluruh dimensinya guna meningkatkan kualitas sumber daya manusia, keluarga, dan masyarakat (Maruf & Andayani, 2022). Program Kampung KB bertujuan untuk merevitalisasi dan *rebranding* dari program KKBPK guna meningkatkan pelayanan kepada keluarga dan masyarakat untuk mengaktualisasikan dan mengaplikasikan fungsi-fungsi keluarga secara keseluruhan. Kegiatan yang ada di Kampung KB tidak terbatas pada penggunaan dan pemasangan alat kontrasepsi, namun menjadi program pembangunan yang terpadu dan terintegrasi dengan berbagai program pembangunan lainnya.

1.5.3 Pemangku Kepentingan Kampung KB

Pemangku kepentingan merupakan semua pihak yang memiliki kaitan serta berkontribusi dalam suatu aktivitas, permasalahan, atau di dalam sebuah program. Pemangku kepentingan adalah individu atau kelompok yang secara aktif terlibat dalam kegiatan atau yang terkena dampak, baik positif maupun negatif, dari kegiatan tersebut (Manghayu et al., 2018, p. 116). Dalam menjelaskan pemangku kepentingan berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2011 tentang Pedoman

Pemetaan Pemangku Kepentingan di Lingkungan Instansi Pemerintahan, semua pihak yang ada di dalam sebuah organisasi baik dari dalam atau dari luar serta memiliki kepentingan dan memiliki pengaruh pada pelaksanaan, eksistensi dan kelangsungan organisasi disebut dengan pemangku kepentingan (BPK, 2011, p. 10). Pemangku kepentingan dibedakan menjadi dua:

- 1) Pemangku Kepentingan Formal, adalah pihak-pihak yang memiliki hubungan secara langsung dengan program yang sedang dijalankan, dalam artian merupakan perpanjangan tangan dari pemerintah dan berpengaruh langsung terhadap program tersebut. Adapun pemangku kepentingan formal yang dimaksud dalam penelitian ini adalah dinas sosial, penyuluh KB, dinas lintas sektor, dan pihak kelurahan.
- 2) Pemangku Kepentingan Informal, pihak yang memiliki kekuasaan dan pengaruh tanpa jabatan formal dan merupakan perpanjangan tangan dari pihak formal. Kekuasaan dan pengaruh yang didapatkan bersumber dari pemberdayaan, pengangkatan, dilatih oleh pemangku kepentingan formal. Adapun pemangku kepentingan informal yang dimaksud dalam penelitian ini adalah ketua pengurus Kampung KB, pokja-pokja Kampung KB, dan PPKBD.

Pemangku kepentingan berasal dari berbagai lapisan, seperti pemerintah kota, pemerintah lokal, lembaga non-pemerintah, dan masyarakat itu sendiri. Dalam pelaksanaan sebuah program pemangku kepentingan unsur pemerintahan dapat mengikutsertakan pemangku kepentingan di luar unsur pemerintahan atau negara secara langsung (Astuti et al., 2020, p. 135). Pemangku kepentingan unsur

pemerintah dan unsur masyarakat ini dapat berperan sebagai inisiator dan koordinator pembentukan komunitas hingga melakukan pembinaan komunitas yang telah terbentuk, dengan kata lain pemangku kepentingan memiliki peran dan pengaruh yang besar pada keberlangsungan sebuah program (Fedora & Hudiyono, 2019).

1.5.4 Tinjauan Sosiologis

Teori yang digunakan oleh peneliti dalam memahami masalah diatas adalah teori Struktural Fungsional oleh Robert K Merton. Dalam hal ini Merton membahas mengenai struktur birokratis yang memberikan tekanan kepada individu agar menjadi “disiplin, bijaksana, dan metodis”. Tekanan ini terkadang mengarah pada kepatuhan yang membabi buta terhadap aturan. Aturan yang mulanya dibuat agar organisasi berfungsi secara efisien, tetapi pada akhirnya dapat memberikan fungsi negatif karena kepatuhan yang berlebihan yang muncul akibat aturan tersebut. Hal ini akan dapat menjurus pada konflik dan ketegangan yang terjadi antara birokrat dan orang-orang yang seharusnya mendapatkan layanan, yang pada akhirnya memunculkan kepribadian yang lebih mematuhi aturan daripada semangat menjalankan alasan aturan tersebut dibuat. Merton juga menjelaskan bagaimana struktur sosial memberikan tekanan yang jelas pada orang-orang tertentu yang ada di dalam masyarakat sehingga mereka lebih menunjukkan perilaku yang non konformis dibanding konformis (Paloma, 2010, p. 34).

Dalam analisa fungsionalnya, Merton menunjukkan beberapa hal yang tidak tepat dan asumsi atau postulat yang kabur dalam teori fungsionalisme. Terdapat 3 postulat Merton dalam analisa fungsional, sebagai berikut:

- 1) Postulat Kesatuan Fungsional Masyarakat, menyatakan bahwa semua kepercayaan dan praktik budaya standar bersifat fungsional bagi masyarakat secara keseluruhan ataupun individu di dalam masyarakat. Artinya berbagai sistem sosial yang ada di dalam masyarakat menunjukkan tinggi integrasi di dalamnya
- 2) Postulat *Fungsionalisme Universal*, postulat ini menganggap bahwa semua bentuk sosial dan kebudayaan yang sudah baku memiliki fungsi positif. Hal ini bertentangan dengan pendapat Merton karena hal tersebut bertentangan dengan apa yang terjadi di dunia nyata, dimana struktur, adat istiadat, keyakinan, dan lain sebagainya tidak selalu memiliki fungsi positif.
- 3) Postulat *Indispensabilitas*, menyatakan bahwa seluruh aspek standar yang ada di masyarakat tidak hanya memiliki fungsi positif tetapi juga memaparkan bagian yang tidak dapat dipisahkan dari keseluruhan. Maksudnya adalah seluruh postulat dan fungsi secara fungsional dibutuhkan di dalam masyarakat.

Kecenderungan fungsionalis yang perhatiannya terpusat pada fungsi-fungsi dari sebuah struktur, dengan menyatukan antara motif subjektif individu dengan fungsi struktur yang seharusnya terfokus pada fungsi-fungsi sosial saja. Merton mendefinisikan fungsi sebagai konsekuensi yang disadari dan menciptakan adaptasi atau penyesuaian suatu sistem. Konsekuensi yang dimaksud tidak selalu dalam bentuk positif tetapi juga pada faktanya mengandung konsekuensi negatif bagi fakta sosial yang lain. Sehingga Merton mengembangkan suatu gagasan tentang disfungsi. Ketika suatu struktur menyumbangkan kontribusi untuk terpeliharanya suatu bagian sebuah sistem, hal tersebut tentu akan mendatangkan konsekuensi

negatif pada bagian yang lain. Dalam artian hal tersebut akan fungsional bagi unit-unit sosial tertentu dan akan menjadi disfungsional bagi unit-unit sosial yang lain. Pada analisis fungsional, Merton juga memperkenalkan fungsi *manifestes* (fungsi yang dikehendaki) dan fungsi *laten* (fungsi yang tidak dikehendaki). Jadi, dalam teori Struktural Fungsional ini, Merton lebih mengarahkan pandangannya pada disfungsi.

Dalam penelitian ini dapat dilihat dalam menjalankan program Kampung KB sesuai arahan oleh pemerintah itu tidak hanya mendatangkan konsekuensi positif di tengah masyarakat, tetapi juga terdapat konsekuensi negatif yang ditimbulkan dari aturan tersebut.

1.5.5 Penelitian Relevan

Dalam sebuah penelitian memerlukan penelitian sebelumnya yang dapat digunakan sebagai acuan dari penelitian yang dilakukan. Penelitian terdahulu juga sebagai dukungan, pedoman, serta perbandingan dalam melakukan penelitian mengenai topik yang dipilih. Dalam penelitian ini terdapat beberapa penelitian terdahulu yang memiliki relevansi terhadap program Kampung KB, diantaranya penelitian yang dilakukan oleh Mohammad Adhitya Andhika (2022) Institut Pemerintahan Dalam Negeri, penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan judul Peranan Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana dalam Melaksanakan Program Kampung KB di Kota Palembang. Pada penelitian ini peranan dari Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana sudah baik dimana program Kampung KB dapat berjalan dengan efektif. Keefektifan program ini dapat dilihat dari keikutsertaan masyarakat dalam berKB, dimana persentase

Penduduk Usia Subur (PUS) yang menggunakan KB mencapai 29,4% dan kegiatan yang ada di Kampung KB terus mengalami kemajuan dengan peningkatan ekonomi daerah tersebut akibat tercipta UMKM mandiri. Di sisi lain peran aktif dari Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana yaitu mengadakan penyuluhan KB, memberikan alat kontrasepsi gratis pada setiap kecamatan serta aktif dalam meningkatkan kesejahteraan keluarga dengan melakukan perubahan pada daerah yang kumuh dan padat penduduk menjadi daerah yang aman dan nyaman untuk ditempati.

Perbedaan penelitian ini dengan penelitian yang akan dilakukan oleh peneliti terletak pada fokus penelitian. Pada penelitian ini fokus terletak pada peranan Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, dalam program Kampung KB. Sementara pada penelitian yang peneliti lakukan yaitu tentang pengelolaan program Kampung Keluarga Berkualitas oleh pemangku kepentingan Tujuan dan lokasi penelitianpun berbeda dengan yang peneliti lakukan. Teori pada penelitian ini teori peranan oleh Soejono Soekanto juga berbeda dengan teori yang digunakan oleh peneliti adalah teori struktural fungsional.

Penelitian berikutnya adalah penelitian yang dilakukan oleh Devi Amalia Nurkhasanah (2021) Universitas Diponegoro. Penelitian ini berjudul Analisis Peran Stakeholders dalam Pengelolaan Program Kampung KB di Kabupaten Boyolali (Studi pada Kampung KB “Mandiri” Dukuh Ngargoyoso, Desa Guwokajen, Kecamatan Sawit, Kabupaten Boyolali. Metode penelitian ini adalah kualitatif dengan hasil penelitian yang menunjukkan bahwa peran *stakeholders* dalam program Kampung KB kurang menunjukkan hasil yang baik. Hal ini dapat dilihat

dari peran *stakeholders* selama mengelola program yang kurang maksimal, mulai dari tahap perencanaan program, pelaksanaan program, sampai kepada tahap pelaporan dan pertanggungjawaban. Adapun yang menjadi hambatan bagi *stakeholders* dalam mengelola program Kampung KB adalah sumberdaya yang belum memadai, keterbatasan informasi dan dukungan terhadap program.

Pada penelitian ini perbedaan terletak pada fokus penelitian yang masih terfokus pada peran *stakeholders* dalam Program Kampung Keluarga Berencana yang dinyatakan menunjukkan hasil yang belum maksimal. Namun, pada penelitian yang dilakukan membahas mengenai pengelolaan program Kampung Keluarga Berkualitas, sehingga bisa ditemukan hambatan yang menyebabkan tidak maksimal pelaksanaan program Kampung KB. Perbedaannya juga terlihat pada lokasi dan tujuan penelitian. Teori yang digunakan pada penelitian ini adalah teori organisasi yaitu teori reed. Pada penelitian yang dilakukan peneliti juga mengalami kebaharuan tahun penelitian.

Penelitian selanjutnya adalah penelitian yang dilakukan oleh Riski Hoeriah (2019) Universitas Sultan Ageng Tirtayasa. Penelitian yang berjudul Implementasi Program Kampung KB di Kampung Kaliwadas Kelurahan Lopang Kecamatan Serang Kota Serang Provinsi Banten menggunakan metode penelitian kualitatif. Hasil penelitian ini mengenai implementasi program Kampung KB Kaliwadas belum berjalan secara optimal. Hal ini disebabkan karena pengurus yang kurang aktif dan inisiatif dalam melaksanakan kegiatan untuk masing-masing kelompok kegiatan, dibuktikan dengan pembinaan yang telah didapatkan oleh pengelola namun tidak disampaikan kepada masyarakat, yang mana hal ini berdampak pada

partisipasi masyarakat dalam kegiatan kelompok kegiatan BKB, BKR, BKL, UPPKS, dan PIK-R. Kurangnya sarana dan prasarana serta minimnya dukungan dari lintas sektor juga menjadi penyebab program Kampung KB berjalan kurang optimal. Faktor lainnya yaitu tidak adanya anggaran dana yang dikhususkan untuk pelaksanaan program Kampung KB.

Perbedaan penelitian ini dengan penelitian yang akan peneliti lakukan terletak pada kebaruan data yang dipaparkan. Pada penelitian ini kampung KB yang dimaksud adalah Kampung Keluarga Berencana, berarti bahwa penelitian ini masih menggunakan konsep Kampung KB sebelum mengalami perubahan. Teori yang digunakan pada penelitian ini yaitu teori implementasi Merille S. Grindle yang berbeda dengan teori yang peneliti gunakan. Tujuan penelitian pada penelitian ini untuk menganalisis pelaksanaan program Kampung KB. Sementara peneliti ingin membahas mengenai pengelolaan program Kampung KB oleh pemangku kepentingan.

1.6 Metode Penelitian

1.6.1 Pendekatan dan Tipe Penelitian

Pada penelitian ini menggunakan pendekatan penelitian kualitatif. Secara umum, pendekatan penelitian kualitatif merupakan jenis penelitian yang menggunakan data deskriptif dari orang dan pelaku yang membutuhkan pengamatan mendalam. Peneliti berupaya untuk menjelaskan dan menganalisis apa yang di dengar dan diamati dari fenomena individu atau kelompok, peristiwa, dinamika sosial, sikap, keyakinan, dan persepsi dalam bentuk deskriptif serta tidak melalui data-data statistik. Menurut (Afrizal, 2014, p. 13), pendekatan kualitatif

adalah pendekatan penelitian ilmu-ilmu sosial yang mengumpulkan dan menganalisis data berupa kata-kata dan perbuatan manusia, serta dalam penelitian kualitatif peneliti tidak berusaha menghitung atau mengkuantifikasikan data kualitatif yang telah diperoleh, dengan demikian pendekatan kualitatif tidak menganalisis angka-angka. Metode penelitian kualitatif dinamakan sebagai metode baru, karena popularitasnya belum lama, dinamakan metode postpositivistik karena berlandaskan pada filsafat postpositivisme. Metode ini disebut juga sebagai metode artistik, karena proses penelitian lebih bersifat seni (kurang terpola), dan disebut sebagai metode interpretive karena data hasil penelitian lebih berkenaan dengan interpretasi terhadap data yang ditemukan di lapangan (Sugiyono, 2013, p. 7).

Penelitian kualitatif merupakan metode-metode untuk mengeksplorasi dan memahami makna yang disampaikan oleh sejumlah individu atau sekelompok orang yang dianggap berasal dari masalah sosial atau kemanusiaan (Creswell, 2017, p. 3). Sehingga peneliti memilih menggunakan pendekatan penelitian kualitatif karena data yang hendak dikumpulkan dan dianalisis memerlukan metode penelitian kualitatif yang memerlukan pengumpulan data dan analisis data berupa kata-kata dan perbuatan-perbuatan manusia (Afrizal, 2014, p. 30).

Pendekatan penelitian kualitatif ini menggunakan tipe penelitian deskriptif. Pada tipe deskriptif peneliti akan menjelaskan secara rinci mengenai fokus penelitian serta menginterpretasikan apa yang terungkap dari data yang telah dikumpulkan sebelumnya dalam bentuk kata-kata tertulis ataupun lisan yang didapatkan dari informan. Sehingga tipe penelitian deskriptif ini dimaksudkan agar mampu mengeksplorasi dan mengklarifikasi dengan tujuan untuk menggambarkan

kondisi yang terjadi sebenarnya mengenai pengelolaan Kampung KB dalam mewujudkan keluarga berkualitas di Kelurahan Tanah Pak Lambik, Kota Padang Panjang.

1.6.2 Informan Penelitian

Dalam sebuah penelitian dibutuhkan subjek penelitian untuk mendapatkan informasi dan data yang dibutuhkan dalam penelitian disebut dengan informan. Informan penelitian adalah orang yang memberikan informasi baik tentang dirinya maupun orang lain atau suatu kejadian atau suatu hal kepada peneliti atau pewawancara mendalam. Dalam sebuah penelitian ada dua kategori informan yaitu informan pengamat dan informan pelaku (Afrizal, 2014, p. 139).

- a. Informan Pengamat adalah informan yang memberikan informasi tentang orang yang diteliti atau suatu hal kepada peneliti. Informan ini dapat disebut sebagai saksi suatu kejadian atau pengamat lokal. Dalam penelitian ini, yang dapat dikategorikan sebagai informan pengamat yaitu ketua forum RT, bidan kelurahan, kader pembantu, Keluarga yang tergabung dalam kelompok kegiatan program Kampung KB, dan tokoh agama.

Tabel 1. 3
Informan Pengamat

1.	Awang	Ketua Forum RT	Pengamat
2.	Nona	Bidan	Pengamat
3.	Rahmi	Kader Pembantu	Pengamat
4.	Sartika Ulfa Nasution	Keluarga Kampung KB	Pengamat
5.	Surya Bunawan	Tokoh Agama	Pengamat

b. Informan Pelaku adalah informan yang memberikan informasi mengenai dirinya, pandangannya, perbuatannya dan pengetahuannya yang berkaitan dengan masalah penelitian. Informan ini dapat disebut sebagai sumber data dan informasi utama dalam penelitian. Dalam penelitian ini, yang dapat dikategorikan sebagai informan pelaku terbagi menjadi dua yaitu :

- 1) Pemangku kepentingan formal yaitu penyuluh KB, Kabid PPKB, penanggung jawab KB, penyuluh agama, lurah, dan kasi pelayanan sosial.
- 2) Pemangku kepentingan informal yaitu ketua kampung KB, PPKBD, dan koordinator-koordinator pokja.

Teknik *purposive sampling* adalah teknik yang digunakan dalam menentukan informan pada penelitian ini. *Purposive sampling* merupakan teknik penentuan sample dengan pertimbangan tertentu (Sutikno & Hadisaputra, 2020, p. 106). Teknik ini menggambarkan bahwa informan yang dijadikan sebagai subjek penelitian sudah didasarkan pada tujuan dan maksud (*purpose*) dari peneliti. Dalam artian sebelum penelitian dilakukan, kriteria tertentu sudah ditetapkan oleh peneliti sebagai informan dari penelitian yang dilakukan sehingga mampu menghasilkan data yang valid.

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan, peneliti melakukan wawancara mendalam bersama 17 informan sebagai sumber data untuk menarik data dan kesimpulan pada penelitian yang dilakukan, sebagai berikut:

Tabel 1. 4
Informan Pelaku

No	Nama	Pekerjaan	Informan	Unsur
1.	Risky Meilinda MZ	Penyuluh KB	Pelaku	Pemerintah
2.	Netty Herawati	Kabid PPKB Dinas Sosial	Pelaku	Pemerintah
3.	Gusnimar	Penanggung Jawab KB	Pelaku	Pemerintah
4.	Wahyu Salim	Penyuluh Agama	Pelaku	Pemerintah
5.	Romi Saputra	Lurah	Pelaku	Pemerintah
6.	Ronny Afdinal	Kepala Seksi Pelayanan dan Sosial	Pelaku	Pemerintah
7.	Syahrial	Ketua Kampung KB	Pelaku	Masyarakat
8.	Darman Susanto	Koordinator Pokja 1	Pelaku	Masyarakat
9.	Eko Saputra	Koordinator Pokja 2	Pelaku	Masyarakat
10.	Sriwati	Koordinator Pokja 3	Pelaku	Masyarakat
11.	Irzal	Koordinator Pokja 4	Pelaku	Masyarakat
12.	Yessi Andriani	PPKBD	Pelaku	Masyarakat

1.6.3 Data yang Diambil

Dalam penelitian kualitatif, data yang dikumpulkan dan dijadikan sumber penelitian berasal dari kata-kata atau perbuatan manusia yang dianalisis yang dikenal dengan data kualitatif. Data kualitatif adalah data yang dikumpulkan dalam bentuk kata-kata (tertulis maupun lisan) dan perbuatan-perbuatan manusia, tanpa ada upaya mengangkakan data yang didapatkan (Afrizal, 2014, p. 17). Dilihat dari jenisnya, data penelitian kualitatif dapat dibedakan menjadi dua jenis :

- a. Data Primer adalah data yang diperoleh langsung melalui observasi dan wawancara yang dilakukan dengan informan penelitian yang dalam hal ini data berupa teks hasil wawancara sebagai sumber pertama (Siyoto & Sodik,

2015, p. 58). Data dapat direkam dan di catat oleh peneliti. Data primer pada penelitian ini adalah data yang didapatkan melalui hasil wawancara dengan pengelola program Kampung KB di Kelurahan Tanah Pak Lambik. Data yang diperoleh sesuai dengan tujuan dari penelitian yang sudah ditetapkan oleh peneliti berupa pernyataan dari informan mengenai pengelolaan program Kampung KB oleh pemangku kepentingan di Kelurahan Tanah Pak Lambik

b. Data Sekunder adalah data yang dikumpulkan dan dilaporkan oleh orang yang ada diluar peneliti sendiri atau dari sumber yang telah ada (Siyoto & Sodik, 2015, p. 58). Data dapat diperoleh oleh peneliti melalui membaca, mendengar, melihat sesuatu yang sudah ada berupa data-data. Data sekunder biasanya diperoleh peneliti melalui pengembangan dari data primer yang didapatkan. Data sekunder dapat berupa :

- 1) Data bentuk teks seperti dokumen pengumuman, surat-surat, dan spanduk,
- 2) Data bentuk gambar, seperti foto, animasi, dan billboard
- 3) Data bentuk suara, seperti hasil rekaman kaset
- 4) Kombinasi teks, gambar, dan suara seperti video, iklan, dan lain-lain

(Kusumastuti & Khoiron, 2019, p. 34)

Dalam penelitian ini data sekunder diperoleh melalui data dalam bentuk teks seperti laporan terkait pelaksanaan kegiatan program Kampung KB, jurnal, artikel, buku dan website terkait penelitian dengan tujuan menambah referensi.

1.6.4 Teknik dan Proses Penelitian

Teknik pengumpulan data merupakan salah satu cara yang dilakukan oleh peneliti dalam upaya memperoleh data atau informasi yang dibutuhkan untuk menjawab permasalahan dalam penelitian dan mampu mencapai tujuan dari penelitian. Dalam penelitian ini untuk mendapatkan data yang valid teknik yang digunakan dalam pengumpulan data adalah dengan menggunakan teknik observasi (pengamatan) dan wawancara mendalam (*indepth interview*) yang dalam hal ini didukung dengan dokumentasi yang dijadikan sebagai data pendukung.

1. Observasi

Menurut Usman dan Purnomo dalam (Hardani et al., 2020, p. 138) observasi adalah pengamatan yang dilakukan dengan pencatatan yang sistematis terhadap apa yang diteliti. Dalam melihat sesuatu yang terjadi, maka peneliti harus melihat, mendengarkan, dan merasakan sendiri (Afrizal, 2014, p. 21). Penggunaan teknik observasi peneliti harus menggunakan pancaindra dan mengharuskan peneliti untuk terjun langsung ke lapangan sehingga dapat memahami apa yang dilakukan oleh informan. Pada penelitian ini observasi yang dilakukan dengan mengamati aktivitas kegiatan program Kampung KB oleh pengelola kegiatan di Kelurahan Tanah Pak Lambik.

2. Wawancara Mendalam atau *Indepht Interview*

Wawancara merupakan teknik pengumpulan data dengan mengajukan pertanyaan secara langsung oleh pewawancara kepada informan dan informasi yang diperoleh dicatat atau di rekam (Siregar, 2004, p. 6). Pada penelitian ini wawancara yang dilakukan kepada informan merupakan wawancara mendalam.

Menurut (Afrizal, 2014, p. 136), wawancara mendalam adalah interaksi sosial informan antara peneliti dan informan tentang suatu hal atau berbagai hal dengan cara yang terkontrol, terarah dan sistematis sehingga kualitas hasil wawancara menjadi baik. Dalam hal ini, pertanyaan yang diajukan kepada informan tidak direncanakan sebelumnya secara mendetail, namun pertanyaan-pertanyaan umum yang pada akhirnya dikembangkan sehingga menjadi detail dalam wawancara.

Pada penelitian ini, peneliti melakukan wawancara mendalam dengan menemui informan penelitian satu persatu dengan tujuan menggali informasi dari informan yang termasuk pada kriteria informan penelitian. Wawancara mendalam ini juga dilakukan secara berulang kali, karena tidak memiliki alternatif jawaban sehingga dapat mengklarifikasi informasi yang sudah diperoleh. Teknik wawancara mendalam ini dilakukan agar peneliti mendapatkan informasi mengenai pengelolaan program Kampung KB oleh pemangku kepentingan di Kelurahan Tanah Pak Lambik.

Langkah awal yang dilakukan peneliti sebelum melakukan wawancara yaitu dengan membuat pedoman wawancara terlebih dahulu agar mengetahui garis besar dari permasalahan yang akan ditanyakan. Lalu membuat janji dengan informan terkait dengan jadwal wawancara yang akan dilakukan serta membuat daftar pertanyaan yang akan ditanyakan. Jika wawancara pertama yang dilakukan belum mencukupi informasi yang diinginkan oleh peneliti, maka peneliti mengatur jadwal wawancara kembali dengan informan untuk menyelesaikan wawancara. Untuk mengumpulkan data dalam penelitian ini,

peneliti harus memiliki instrument penelitian yang mampu menunjang wawancara seperti, handphone atau perekam, buku catatan, alat tulis. Sebelum itu peneliti harus memiliki pedoman wawancara yang dibutuhkan berupa garis besar permasalahan yang ingin ditanyakan.

Proses penelitian dimulai pada bulan Januari, penulis mulai melakukan diskusi kembali dengan pembimbing terkait saran yang diberikan oleh penguji saat seminar proposal. Untuk memperkuat mengenai program Kampung KB, peneliti melakukan wawancara dengan Kepala Bidang Keluarga Berencana yang ada di BKKBN wilayah Sumatera Barat pada tanggal 25 Januari 2024. Setelah mendapatkan informasi yang dibutuhkan, peneliti melakukan revisi diiringi dengan diskusi terkait pedoman wawancara yang digunakan untuk turun lapangan. Setelah melakukan revisi terkait pedoman wawancara tersebut pada tanggal 01 Februari 2024 peneliti mulai turun lapangan untuk melakukan observasi dan wawancara secara mendalam. Peneliti mulai menemui informan satu persatu dan dilaksanakan dengan tidak terstruktur atau bebas. Setelah mendapatkan surat izin penelitian dari pihak fakultas, peneliti langsung menyerahkan kepada pihak kelurahan agar diberikan izin untuk melakukan penelitian di Kelurahan Tanah Pak Lambik. Peneliti mulai pada awal bulan Februari yang berdekatan dengan menjelang pemilu dan banyaknya kegiatan yang diselenggarakan di Kota Padang Panjang sehingga cukup sulit untuk mengatur jadwal dengan informan.

Pada tanggal 01 Februari 2024 ketika menyerahkan surat izin penelitian, pada saat yang sama Lurah Tanah Pak Lambik bersedia untuk diwawancarai di ruangnya. Selanjutnya pada hari yang sama peneliti terlebih dahulu menghubungi

para informan melalui telepon ataupun chat untuk mengatur jadwal wawancara, sehingga pada hari itu peneliti juga dapat mewawancarai ketua Kampung KB. Informan juga membantu untuk peneliti dapat berkomunikasi dengan penyuluh KB yang ditugaskan di kelurahan Tanah Pak Lambik, setelah membuat janji maka pada tanggal 05 Februari 2024 peneliti dapat melakukan wawancara dengan penyuluh KB di Kantor Penyuluh KB Kecamatan Padang Panjang Timur. Pada hari yang sama juga akan dilakukan wawancara dengan PPKBD, namun terhalang kondisi PPKBD yang memiliki kesibukan maka diundur tanggal 07 Februari di rumah informan.

Setelah berupaya untuk membuat janji dengan informan berikutnya dengan menghubungi melalui *whatsapp* dan mendatangi tempat informan bekerja, maka pada tanggal 13 Februari 2024 peneliti dapat mewawancarai Kepala Seksi Pelayanan Sosial Kelurahan Tanah Pak Lambik. Pada hari yang sama melakukan wawancara dengan ketua Kemenag Kota Padang Panjang dan diarahkan untuk bertemu dengan penyuluh agama KUA Kecamatan Padang Panjang Timur pada tanggal 19 Februari 2024. Selanjutnya pada tanggal 21 Februari 2024, pihak dari OPD KB bersedia untuk dilakukan wawancara setelah peneliti menunggu ketersediaan informan karena terkendala kegiatan PIK-R Kota Padang Panjang yang harus dilaksanakan. Pada tanggal 24 Februari 2024, setelah pihak puskesmas melakukan perjalanan dinas luar kota selama satu minggu, akhirnya peneliti dapat melakukan wawancara di Puskesmas Koto Katik.

Setelah itu, peneliti melakukan reduksi data dan diserahkan pada pembimbing untuk kembali didiskusikan. Setelah berdiskusi peneliti mendapat arahan untuk

menambah informan dari masing-masing koordinator pokja Kampung KB dan tambahan untuk mewawancarai informan pengamat dan kembali membuat janji dengan informan penelitian yang dibutuhkan. Pada tanggal 23 Maret 2024 peneliti mewawancarai koordinator Pokja 1 di kediaman informan. Pada hari yang sama dua orang informan mengkonfirmasi bahwa dapat diwawancarai sehingga peneliti melakukan wawancara pada Pokja 2 dan 4 pada tanggal 24 Maret 2024. Setelah menunggu beberapa hari karena koordinator Pokja 4 belum bisa diwawancarai karena sakit, pada tanggal 28 Maret 2024 peneliti akhirnya dapat mewawancarai koordinator Pokja 4.

Peneliti kembali mereduksi data yang didapatkan dan mendiskusikan kembali dengan pembimbing mengenai temuan yang akan dijelaskan pada Bab III. Pada bulan April peneliti mulai melakukan analisis dan kembali melanjutkan penulisan skripsi. Proses pengumpulan data dari informan tidaklah mudah dilakukan, karena pada pelaksanaannya peneliti harus menyesuaikan dengan jadwal informan yang padat serta tertunda karena adanya persiapan pemilu 2024.

1.6.5 Unit Analisis Data

Unit analisis data merupakan salah satu bagian terpenting dalam sebuah penelitian. Unit analisis data adalah satuan yang digunakan untuk menganalisis data yang berguna untuk memfokuskan kajian dalam sebuah penelitian yang dilakukan. Dalam arti lain unit analisis diartikan sebagai sesuatu yang berkaitan dengan fokus atau komponen yang diteliti serta harus disesuaikan dengan permasalahan dan tujuan penelitian. Unit analisis dalam sebuah penelitian dapat berupa individu, kelompok, masyarakat, dan lembaga. Pada penelitian yang dilakukan ini unit

analisisnya adalah lembaga yang sudah ditentukan kriterianya yaitu pengelola atau pengurus program Kampung KB di Kelurahan Tanah Pak Lambik.

1.6.6 Analisis Data

Analisis data penelitian kualitatif merupakan suatu proses yang sudah diatur untuk menetapkan bagian-bagian yang saling berkaitan antara bagian -bagian dan keseluruhan dari data yang telah dikumpulkan untuk menghasilkan kesimpulan (Afrizal, 2014, p. 175). Data yang telah dikumpulkan didapatkan melalui wawancara dengan informan penelitian dan observasi yang dilakukan di lapangan, sehingga mampu memberikan gambaran mengenai penelitian yang dilakukan. Analisis data terus menerus dilakukan selama penelitian dilaksanakan terhitung sejak awal mula terjun ke lapangan sampai membuat hasil penelitian menjadi sebuah laporan. dalam hal ini yang dianalisis adalah data mentah yang diperoleh di lapangan berupa catatan, penuturan, perbuatan, dan lain sebagainya yang sekiranya sesuai dengan pokok permasalahan.

Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian kualitatif mengacu pada konsep Miles dan Huberman dalam (Saleh, 2017, p. 80), meliputi 3 rangkaian kegiatan yaitu ;

a. Reduksi Data

Reduksi data adalah Mereduksi data berarti merangkum, memilih hal-hal pokok, memfokuskan pada hal-hal yang penting, serta dicari tema dan polanya karena data yang didapatkan di lapangan jumlahnya cukup banyak sehingga perlu untuk dicatat secara rinci. Hal ini tentu saja membutuhkan reduksi data untuk menganalisis data yang diperoleh, dengan demikian data

yang telah direduksi akan lebih jelas memberikan gambaran serta mempermudah peneliti untuk melakukan pengumpulan sebelumnya. Proses berpikir dalam reduksi data membutuhkan kecerdasan, keeluasaan, dan kedalaman wawasan yang tinggi.

b. Penyajian Data (*Display Data*)

Tahapan lanjutan dalam analisis data yaitu penyajian data, dapat berupa bentuk tulisan atau kata-kata, gambar, grafik, dan table. Tujuannya adalah untuk menyatukan informasi yang diperoleh agar memberikan gambaran mengenai keadaan yang sedang diteliti. Dalam hal ini peneliti harus membuat dalam bentuk matriks, naratif, atau grafik dengan tujuan agar mempermudah peneliti dalam menguasai informasi yang didapatkan.

c. Penarikan Kesimpulan (Verifikasi)

Sejak awal penelitian tujuan dari peneliti melakukan analisis data adalah untuk mendapatkan kesimpulan agar mengetahui makna dari informasi yang di dapatkan. Selama proses penelitian sedang berlangsung, peneliti sudah bisa melakukan penarikan kesimpulan sementara dan setelah data yang terkumpul sudah benar-benar lengkap maka dapat ditarik kesimpulan akhir. Setelah ditarik kesimpulan, maka peneliti memastikan keabsahannya dengan cara melihat ulang kodifikasi dan penyajian data yang dilakukan pada tahap sebelumnya sehingga kekeliruan dalam analisis data tidak terjadi.

1.6.7 Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian dapat dipahami sebagai setting atau konteks sebuah penelitian. Tempat tidak selalu mengacu pada wilayah penelitian tetapi juga dapat diartikan sebagai organisasi dan sejenisnya (Afrizal, 2014, p. 128). Lokasi penelitian ini dilakukan pada Kampung KB Kelurahan Tanah Pak Lambik yang terletak di Kota Padang Panjang. Kampung KB ini berjarak $\pm 76,6$ km dari Kota Padang dan berjarak $\pm 20,3$ km dari Kota Bukittinggi. Adapun yang menjadi alasan peneliti memilih Kampung KB Kelurahan Tanah Pak Lambik karena capaian program di Kampung KB ini masih tergolong rendah di Kota Padang Panjang dan juga merupakan kategori wilayah prioritas program karena berada di sepanjang bantaran kereta api.

1.6.8 Definisi Operasional

Definisi operasional merupakan kerangka konsep yang dijelaskan dan memiliki makna agar tujuan penelitian dapat terjawab sehingga memunculkan instrumen penelitian Adapun definisi operasional dari penelitian ini adalah :

1. Pengelolaan adalah serangkaian kegiatan yang mencakup perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, dan evaluasi program dengan melibatkan koordinasi antara berbagai pihak, pengelolaan sumber daya, pemantauan kinerja, serta penerapan kebijakan dan prosedur yang dirancang untuk memastikan bahwa program berjalan sesuai rencana dan memberikan manfaat bagi masyarakat.
2. Pemangku Kepentingan Formal adalah pihak-pihak yang terlibat secara langsung dalam program Kampung KB dan berasal dari struktur

pemerintahan, seperti Dinas Sosial P2KBP3A, dinas yang menjadi mitra program, penyuluh KB, lurah beserta jajaran.

3. Pemangku Kepentingan Informal adalah pihak-pihak yang terlibat secara langsung dalam program Kampung KB dan berasal dari struktur masyarakat serta mewakili kepentingan masyarakat luas, seperti pengurus program Kampung KB.
4. Kampung Keluarga Berkualitas adalah wilayah kategori prioritas yang menjalankan pembauran pelaksanaan kegiatan berdasarkan 8 fungsi keluarga dengan intervensi lintas sektor serta bersama pihak lain untuk meningkatkan kualitas keluarga.

1.6.9 Jadwal Penelitian

Penelitian ini dilakukan selama 6 bulan, yang dimulai dari bulan Januari hingga Juni 2024. Untuk lebih jelasnya berikut jadwal penelitian pada tabel berikut.

**Tabel 1. 5
Jadwal Penelitian**

No	Nama Kegiatan	2024						
		Jan	Feb	Mar	Apr	Mei	Jun	Jul
1.	Diskusi Pedoman Wawancara							
2.	Penelitian Lapangan							
3.	Analisis Data							
4.	Penulisan dan Bimbingan Skripsi							
5.	Ujian Komprehensif							